



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perhubungan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pekalongan, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 19750305 199803 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Dinas Perhubungan pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perhubungan pada tahun 2024 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perhubungan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,35.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Perhubungan sebesar 77,15 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 101,05%.

2. Indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A didapatkan hasil 23,53%.

Nilai diatas didapatkan dari hasil Survei Lalu Lintas Kota Pekalongan tahun 2024 yaitu terdapat 20 ruas jalan yang mendapatkan kategori pelayanan jalan A dari total 85 ruas jalan yang dilaksanakan survei.

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 30.116.603.003,- atau 97,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp 31.020.652.000,-.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR	4
1.4 ISU STRATEGIS	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026	9
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026	13
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 PENGUKURAN KINERJA	18
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	40
Indikator Kinerja Utama Perubahan 2021-2026	40
Perjanjian Kinerja Perubahan 2024	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

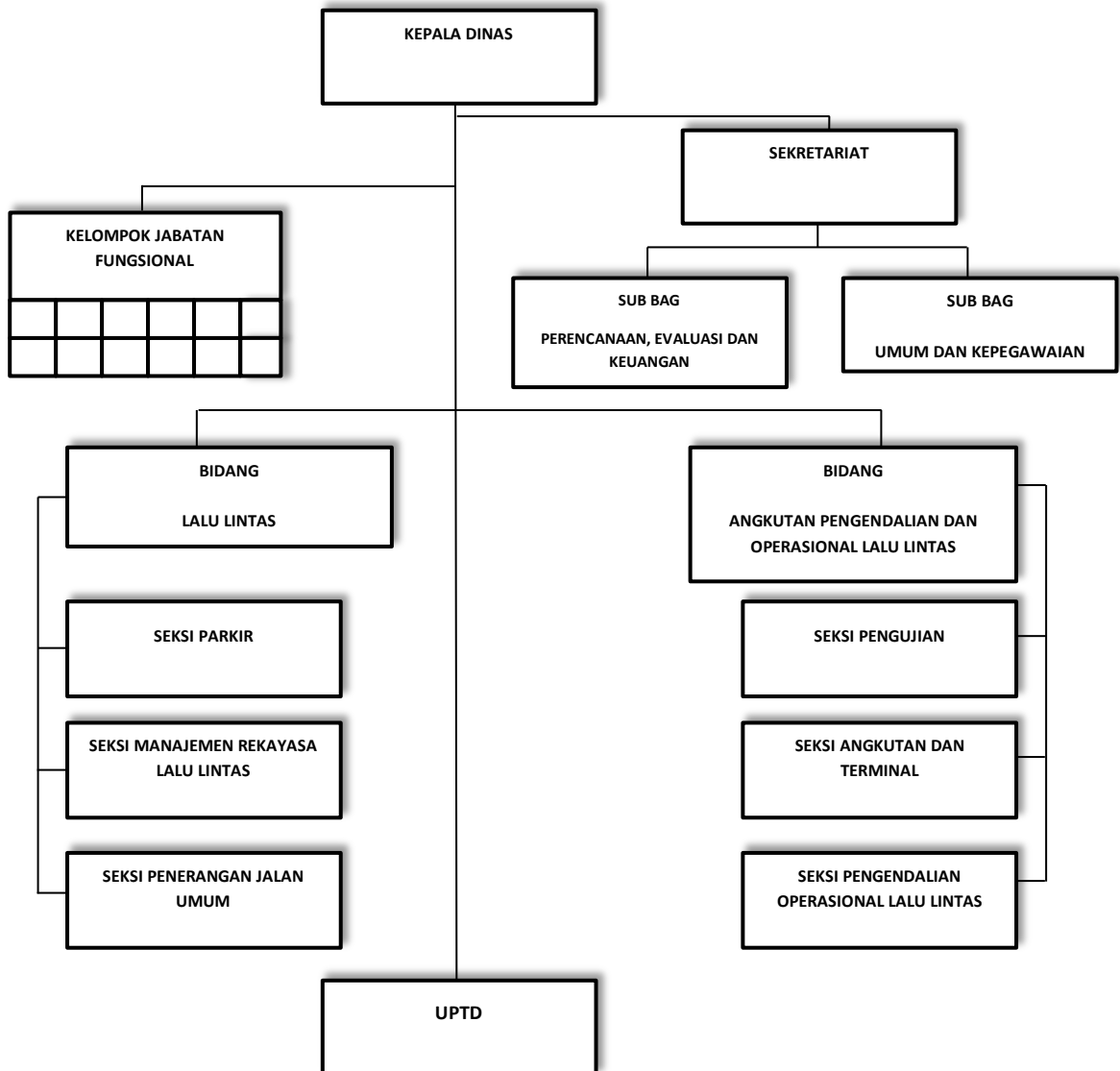
Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, serta didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah. tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang lalu lintas;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Kesekretariatan;
6. Pengarahan dan Pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:

1.3 KONDISI APARATUR



Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Pekalongan terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya seperti peralatan/perlengkapan/asset.

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Karyawan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sampai dengan 1 Januari 2024, tercatat sebanyak 151 orang. Keadaan Karyawan berdasarkan status kepegawaiannya, pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaiannya

Tabel 1. 1 Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaiannya

No	Nama OPD	Status Karyawan				Jumlah
		PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Kegiatan	
1	Dinas Perhubungan	39	-	7	105	151

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diperoleh gambaran bahwa Jumlah karyawan dengan status tenaga kegiatan lebih mendominasi, yaitu sebesar 69,54% dari total karyawan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Tabel 1.2 Jumlah Karyawan berdasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	0
2	Pasca Sarjana (S-2)	3
3	Sarjana Strata 1 (S-1)	42
4	Diploma IV (D-IV)	9
5	Diploma III (D-III)	19
6	Diploma II (D-II)	5
7	SLTA	69
8	SLTP	2
9	SD	2
Jumlah		151

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan karyawan di Dinas Perhubungan didominasi tingkat SLTA yaitu sebesar 45,70% dari total Karyawan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3 Jumlah Karyawan berdasar Jenis Kelamin

No	OPD	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dinas Perhubungan	124	27	151

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Karyawan Laki-laki lebih banyak, yaitu sebesar 82,11% dari total Karyawan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Tabel 1.4 Jumlah Karyawan berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	OPD	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Dinas Perhubungan	4	21	14	0	39

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, diperoleh gambaran bahwa Jumlah PNS Golongan III lebih mendominasi, yaitu sebesar 53,85% dari total PNS yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sangat beragam dan mencakup berbagai aspek untuk memastikan kelancaran transportasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sarana pendukung operasional meliputi kendaraan dinas seperti mobil patroli, motor untuk inspeksi, dan kendaraan khusus seperti mobil derek. Selain itu, tersedia pula peralatan seperti traffic cone, barikade portabel, rambu lalu lintas, alat pengukur emisi, dan timbangan portabel untuk kendaraan berat. Jalan raya, marka jalan, lampu lalu lintas berbasis Area Traffic Control System (ATCS), serta rambu tetap dan papan informasi digital juga termasuk dalam prasarana transportasi yang dikelola.

Dinas Perhubungan juga memiliki prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor (KIR) seperti gedung pengujian lengkap dengan alat uji rem, emisi, dan kecepatan. Teknologi memainkan peran penting melalui sistem seperti CCTV pemantau lalu lintas, ruang *command center*, serta aplikasi digital seperti e-KIR dan sistem pembayaran non-tunai. Untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, tersedia fasilitas seperti pos pemantauan lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), *guard rail*, dan *speed bump* di area rawan kecelakaan. Dalam mendukung administrasi, Dinas Perhubungan memiliki kantor yang dilengkapi ruang kerja, ruang rapat, sistem informasi, dan ruang pelayanan masyarakat. Selain itu, terdapat gudang penyimpanan peralatan lalu lintas, fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, dan area parkir kendaraan dinas. Semua sarana dan prasarana ini saling mendukung untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, lancar, dan terintegrasi.

1.3.3. Anggaran

Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan strategis untuk meningkatkan layanan transportasi, keselamatan lalu lintas, dan infrastruktur pendukung. Anggaran ini juga digunakan untuk membiayai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi seperti halte, dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (KIR). Biaya operasional seperti pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, alat berat, dan lampu lalu lintas. Di bidang keselamatan untuk pengadaan alat keselamatan jalan seperti *guard rail*, penyediaan penerangan jalan umum (PJU), dan *speed bump*, serta untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Anggaran juga mendukung tugas administratif seperti pelaksanaan pelayanan publik, mengelola data transportasi, dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Program yang dianggap paling penting, seperti revitalisasi transportasi umum, integrasi antar moda, dan peningkatan konektivitas wilayah, akan mendapatkan

dukungan lebih banyak dana. Dinas Perhubungan dapat mendorong pengembangan sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan dengan mengatur anggaran sesuai dengan pagu yang ditetapkan.

1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun ke belakang, serta tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang akan dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yaitu:

1. Pengoptimalan rekayasa lalu lintas dan peningkatan kualitas angkutan umum untuk meningkatkan produktivitas pengguna jalan;
2. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di Kawasan strategis;
3. Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dikarenakan keterbatasan APBD Kota Pekalongan;
4. Adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan di lokasi rencana pembangunan Terminal Tipe C tersebut juga dilewati trayek Angkutan AKDP;
5. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dikarenakan belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut

atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Perhubungan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Tujuan Kota : Menjamin Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	
Tujuan Dinas Perhubungan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,14
Sasaran Dinas Perhubungan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,35
Program Dinas Perhubungan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
Program Dinas Perhubungan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Kegiatan Dinas Perhubungan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Program Dinas Perhubungan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan/ pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 6 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Tujuan Dinas Perhubungan 2 : Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service)	B
Sasaran Dinas Perhubungan 2 : Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	28%
Program Dinas Perhubungan 2 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95%
Kegiatan Dinas Perhubungan 8 : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis
Kegiatan Dinas Perhubungan 9 : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali
Program Dinas Perhubungan 2 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio
Kegiatan Dinas Perhubungan 10 : Penetapan Rencana Induk Jaringan	Persentase pelaksanaan kegiatan	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	
Kegiatan Dinas Perhubungan 11 : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnya	2 titik per tahun
Kegiatan Dinas Perhubungan 12 : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92%
Kegiatan Dinas Perhubungan 13 : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83%
Kegiatan Dinas Perhubungan 14 : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	2 kegiatan
Kegiatan Dinas Perhubungan 15 : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan awak angkutan umum	30,73%
Program Dinas Perhubungan 2 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75%
Kegiatan Dinas Perhubungan 16 : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	65,19%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perhubungan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Target Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan Dengan Kategori Nilai A	Persen	Kinerja Ruas Jalan dengan kategori A Tahun (N) dibagi Total Ruas Jalan Tahun (N) * 100%	Dinhub

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Target Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,50	74,00	75,50	76,35	76,60	76,85

2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan Dengan Kategori Nilai A	Persen	28	28	28	28	28	28
---	--	---	--------	----	----	----	----	----	----

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Indikator	Formulasi	Tipe Capaian	Sumber	2024	
						Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM tahun N	Semakin Tinggi Semakin Baik	Bagian Organisasi	Indeks	78,14
2	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level Of Service</i>)	Standar Nilai LOS MKJI Kemen PU	Semakin Tinggi Semakin Baik	Dinas Perhubungan	Kategori	B

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Tipe Capaian	Sumber	2024	
						Satuan	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP Tahun N	Semakin Tinggi Semakin Baik	Inspektorat	Indeks	76,35
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan Dengan Kategori Nilai A	Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A Tahun (N) dibagi Total Ruas Jalan Tahun (N) * 100%	Semakin Tinggi Semakin Baik	Dinas Perhubungan	Persen	28

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.667.700.000	APBD-P
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 9.342.952.000	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor

berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}} 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,35	77,15	101,15	Tercapai
2	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persentase	28	23,53	84,03	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak satu target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak satu target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 92,59% dengan kategori sangat berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,50	75,65	76,10	77,15	▲
2	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persentase	25	21	24	23,53	▼

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77,15	76,85	101,56	Tercapai
2	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori Nilai A	Persentase	23,53	28	84,03	Tidak tercapai

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,58	94,12	111,28	Tercapai
2	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service)	Kategori	B	B	100	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 105,64% dengan kategori sangat berhasil.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	72,50	Indeks	75,65	76,10	76,35	77,15	101,05	76,85

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan memperoleh nilai 77,15 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perhubungan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan
Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	83,40
3	DLH	85,45
4	DINDAGKOP DAN UMKM	85,75
5	INSPEKTORAT	84,60
6	DPUPR	81,25
7	BPKAD	84,50
8	DPMPPA	82,75
9	DKP	83,25

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
10	BKPSDM	83,20
11	DINDUKCAPIL	82,90
12	DINKES	83,20
13	SETDA	81,50
14	DINDIK	78,45
15	DINPARBUDPORA	77,55
16	DPMPTSP	77,90
17	DINHUB	77,15
18	DINPERPA	76,10
19	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,00
20	DINARPUS	75,45
21	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,15
22	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,10
23	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,25
24	BPBD	75,45
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOSP2KB	75,90
27	DINPERKIM	74,75
28	SATPOL P3KB	74,25
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
30	KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	16.257.000	16.257.000	15.231.800

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.631.280.000	4.446.325.000	4.092.792.775
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000	29.121.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.500.000	145.500.000	143.170.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.581.000	754.877.000	746.614.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.352.028.000	15.713.598.000	15.512.362.535
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.991.000	569.143.000	538.775.645
	Total	21.322.637.000	21.677.700.000	21.078.067.755

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,57%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,05%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 3,56%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 7 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen yang ditetapkan.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang ditetapkan.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan survei pendataan aset Dinas Perhubungan yang berada diluar kantor sesuai yang ditetapkan.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan pakaian dinas harian kantor yang ditetapkan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor sesuai yang ditetapkan.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan kegiatan penunjang urusan kantor sesuai yang ditetapkan.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dan urusan kantor telah sesuai yang ditetapkan.

b. SASARAN 2 : MENINGKATKAN KAPASITAS JALAN PERKOTAAN

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	28	Persentase	21	24	28	23,53	84,03	28

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas tergambar bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja dari Sasaran 2 yang tidak tercapai, yaitu indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan Dengan Kategori A. Hal tersebut didasarkan pada hasil survei kendaraan pada tahun 2023 terdapat peningkatan arus lalu lintas pada ruas- ruas jalan di dalam kota sehingga yang semula jalan dengan kinerja A menjadi B. Namun demikian ruas jalan yang berubah tidak menimbulkan kemacetan.

Selain itu penyebab berubahnya kinerja jalan yaitu meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di dalam Kota Pekalongan sehingga meningkatnya arus lalu lintas di dalam kota, peningkatan kendaraan pribadi sepeda motor dan mobil pribadi.

Indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori Nilai A merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa Ruas Jalan di Kota Pekalongan sebagai upaya pengurangan kepadatan arus lalu lintas di Kota Pekalongan;
2. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan yang memiliki kepadatan arus lalu lintas;
3. Menambah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di beberapa ruas jalan serta menerapkan tindakan Penderekan dan Penggembokan terhadap Kendaraan yang melanggar Rambu Larangan Parkir;
4. Melakukan patroli rutin di kawasan parkir tepi jalan yang tidak sesuai tempatnya dan pelanggaran pengguna jalan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas;
5. Melakukan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas pada Anak Sekolah sebagai upaya memberikan Pemahaman tentang Tata Tertib Lalu Lintas dalam berkendara di jalan raya agar menjaga keselamatan berkendara di jalan.

Adapun Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran 2, diantaranya adalah :

1. Jumlah kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil yang jumlahnya terus meningkat sedangkan kapasitas jalan tidak bertambah (tetap) sehingga meningkatkan kepadatan arus lalu lintas.
2. Masih banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu parkir kendaraan yang tidak sesuai aturan dan derajat parkir yang tidak sesuai marka parkir yang mengakibatkan kepadatan jalan yang menghambat lalu lintas jalan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan giat patroli lalu lintas di beberapa lokasi yang arus lalu lintasnya padat;
2. Menambah jumlah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kota Pekalongan;
3. Bekerjasama dengan stakeholder terkait sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang Tata Tertib Lalu Lintas dalam berkendara di jalan raya sejak dini agar mengurangi tingkat kecelakaan pada anak sekolah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.005.080.000	3.005.080.00	2.978.749.582
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.784.587.000	5.071.512.000	4.823.608.978
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	45.000.000	45.000.000	43.700.714
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	325.850.000	325.850.000	323.185.400
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	246.764.000	210.048.000	207.150.184
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	616.812.000	616.812.000	598.323.139
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.750.000	15.750.000	15.589.000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	27.900.000	27.900.000	25.338.450
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	22.889.800
	Total	6.092.743.000	9.342.952.000	9.038.535.247

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 96,36%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 84,03%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat 3 indikator pada program ini, yaitu indikator Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ target 95% dan realisasi 103,28% sehingga capaiannya 108,71%, indikator Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) target 0,44 rasio dan realisasi 0,44 sehingga capaiannya 100%, dan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala target 0,75 persen dan realisasinya -8,33 persen sehingga capaiannya 1,11 persen. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 9 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan survei lalu lintas dan pelaksanaan kegiatan pengamanan kegiatan sesuai yang ditetapkan.
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator Jumlah penyediaan perlengkapan jalan dengan target 4 jenis dan realisasi 4 jenis sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target penyediaan PJU, Marka, Taman Lalu lintas dan cermin tikung sesuai yang ditetapkan.
 - 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ini diukur dengan indikator Jumlah penyediaan perlengkapan jalan dengan target 4 jenis dan realisasi 4 jenis sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target penyediaan PJU, Marka, Taman Lalu lintas dan cermin tikung sesuai yang ditetapkan.

- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ini diukur dengan indikator Jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnya dengan target 2 titik dan realisasi 2 titik sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target Depan pande rasa Depan indomaret gamer sesuai yang ditetapkan.
- 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output) yang diterbitkan izinnya dengan target 65,19% dan realisasi 39,88% sehingga capaiannya 61,1%. Indikator ini belum tercapai karena karena belum sadarnya masyarakat untuk melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor, sehingga jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala menurun.
- 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan dengan target 92% dan realisasi 92,39% sehingga capaiannya 100,43%. Indikator ini tercapai yaitu jumlah kegiatan penataan manajemen rekayasa lalu lintas tercapai sesuai target.
- 7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin) dengan target 83% dan realisasi 83,33% sehingga capaiannya 100,40%. Indikator ini tercapai yaitu pelaksanaan kegiatan tinjauan andalalin Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin) tercapai sesuai target.
- 8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan untuk Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan dengan target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai dua kegiatan yaitu

pembinaan pengemudi, kegiatan pembinaan dan monitoring perusahaan angkutan umum tercapai sesuai target.

- 9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator Persentase pembinaan awak angkutan umum yang dilaksanakan dengan target 30,73% dan realisasi 8,12% sehingga capaiannya 26,43%. Indikator ini tidak tercapai karena hanya terdapat penyediaan kegiatan fasilitasi bus sekolah sehingga tidak tercapai sesuai target.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 31.020.652.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 30.116.603.003,- atau sebesar 97,09%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 26.668.946.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.104.621.228,- atau sebesar 97,88%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.257.000	15.231.800	93,69%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.494.000	2.145.000	86,01%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.763.000	1.590.000	90,19%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.496.800	95,81%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.446.325.000	4.092.792.775	92,05%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.351.706.000	4.011.981.775	92,19%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.985.000	79.180.000	85,15%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.634.000	1.631.000	99,82%
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.000.000	29.121.000	91,00%
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	32.000.000	29.121.000	91,00%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.500.000	143.170.000	98,40%
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145.500.000	143.170.000	98,40%
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.877.000	746.614.000	98,91%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.945.000	99,21%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.500.000	84.772.000	93,67%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.881.000	12.878.000	99,98%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	358.500.000	357.515.500	99,73%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.200.000	152.881.000	99,79%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.439.000	97,56%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.296.000	129.183.500	99,15%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.713.598.000	15.512.362.535	98,72%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100,00%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.361.570.000	15.161.345.351	98,70%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.228.000	349.217.184	99,71%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.143.000	538.775.645	94,66%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	381.718.000	352.647.600	92,38%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.500.000	123.425.045	99,14%
21	"Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	62.925.000	62.703.000	99,65%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
	Lainnya"			
H	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.005.080.000	2.978.749.582	99,12%
22	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	31.800.000	31.035.600	97,60%
23	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.973.280.000	2.947.713.982	99,14%
I	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.071.512.000	4.823.608.979	95,11%
24	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	509.735.000	467.808.550	91,77%
25	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	270.000.000	265.840.657	98,46%
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4.017.777.000	3.830.945.772	95,35%
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	274.000.000	259.014.000	94,53%
J	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	45.000.000	43.700.714	97,11%
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	45.000.000	43.700.714	97,11%
K	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	325.850.000	323.185.400	99,18%
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	325.850.000	323.185.400	99,18%
L	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	210.048.000	207.150.184	98,62%
30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.200.000	34.325.000	97,51%
31	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	53.000.000	53.000.000	100,00%
32	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.848.000	119.825.184	98,34%
33	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-
M	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	616.812.000	598.323.139	97,00%
34	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	117.253.000	110.621.279	94,34%
35	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000	22.599.900	90,40%
36	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	474.559.000	465.101.960	98,01%
N	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	15.750.000	15.589.000	98,98%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
	Kabupaten/Kota			
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15.750.000	15.589.000	98,98%
O	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	27.900.000	25.338.450	90,82%
38	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	18.500.000	16.258.650	87,88%
39	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	9.400.000	9.079.800	96,59%
P	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	22.889.800	91,56%
40	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00%
41	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	12.889.800	85,93%

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada periode 2021-2026 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Kota Pekalongan yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi berorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Pekalongan serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan "Sangat Berhasil". Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap target pada tahun 2024 rata-rata sebesar 92,59%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan

Sasaran-1 Indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A tidak mencapai target yaitu sebesar 84,03% dari target. Hal ini disebabkan berubahnya kinerja ruas jalan, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di dalam Kota Pekalongan namun tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, sehingga hal tersebut

menyebabkan meningkatkan arus lalu lintas di dalam kota,

b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Nilai SAKIP OPD pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan sebesar 101,15%.

2. Serapan Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan yaitu sebesar Rp. 30.116.603.003,00 atau (97,09%) dari total anggaran sebesar Rp. 31.020.652.000,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 904.048.997,00 atau 2,91%.

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, di antaranya :

1. Belum terpenuhinya target jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala;
2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh kapasitas jalan yang memadai, sehingga menambah kemacetan di dalam kota;
3. Masih seringnya aset Dinas Perhubungan yang berada di luar kantor yang hilang atau rusak oleh oknum tidak bertanggung jawab;
4. Belum adanya jalan lingkar di Kota Pekalongan, sehingga seluruh kendaraan baik besar maupun kecil bertumpuk di dalam kota;
5. Kota Pekalongan belum mempunyai Terminal Angkutan Barang, sehingga bongkar muat barang masih dilakukan di beberapa ruas jalan dan berdampak mengganggu arus lalu lintas;
6. Adanya angkutan berbasis online yang mengurangi jumlah penumpang angkutan umum yang mengakibatkan semakin menurunnya jumlah kendaraan angkutan berizin yang beroperasi;
7. Masih seringnya truk atau kendaraan besar lainnya yang parkir atau istirahat di tepi jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas;
8. Masih kurangnya integrasi moda transportasi, sehingga masyarakat masih merasa kesulitan dalam menggunakan transportasi umum.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) agar melaksanakan uji berkala sesuai dengan ketentuan dengan cara mengirimkan pengingat melalui SMS Gateway dan mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan uji kendaraan;
2. Melakukan optimalisasi pengaturan lalu lintas antara lain dengan mengatur jalur-jalur tertentu untuk kendaraan dengan kapasitas tinggi, serta membuka jalur khusus pada jam-jam tertentu untuk mengurangi kemacetan di jalur utama;
3. Melakukan pengawasan dan pemahaman kepada masyarakat agar selalu menjaga perlengkapan jalan agar dapat beroperasi dengan baik;
4. Mengusulkan pembiayaan infrastruktur strategis yaitu pembangunan jalan Lingkar Luar dan Terminal Angkutan Barang di Kota Pekalongan;
5. Melaksanakan penyuluhan dan penertiban hukum terhadap pengemudi truk atau kendaraan besar lainnya yang parkir sembarangan di tepi jalan, serta penempatan petugas lalu lintas secara rutin untuk memantau dan mengawasi kendaraan besar yang parkir sembarangan, terutama pada jam-jam sibuk atau di jalur utama;
6. Meningkatkan integrasi moda transportasi yaitu membuat sistem transportasi umum yang terintegrasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah beralih dari satu moda ke moda lainnya.

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72,50	72,50	74,00	75,50	76,35	76,60	76,85	Inspektorat Daerah	Dinhub
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	Kinerja Ruas Jalan dengan kategori A Tahun (N) dibagi Total Ruas Jalan Tahun (N) * 100%	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	28	28	28	28	28	28	28	Dinhub	Dinhub

Pekalongan, 9 Desember 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan

M. RESTU HIDAYAT, S.SIT., MT.
NIP. 19750305 199803 1 005

Perjanjian Kinerja Perubahan 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. RESTU HIDAYAT, S.SiT., MT.**

Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 9 Desember 2024

Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan

M. RESTU HIDAYAT, S.SiT., MT.
NIP. 19750305 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,14	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Service</i>)	B	Formulasi : Standar Nilai LOS MKJI Kemen PU Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dishub
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,35	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Presentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	28%	Formulasi : Kinerja Ruas Jalan dengan kategori A tahun (N) dibagi total ruas jalan tahun (N) * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dishub

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.677.700.000,00	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkota Jalan (LLAJ)	Rp. 9.342.952.000,00	APBD-P



Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD ALIFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Perhubungan

M. RESTU HIDAYAT, S.Si.T., MT.
NIP. 19750305 199803 1 005